



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 67 /KEP/HK/2016

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (POKJA IDI NTT)
TAHUN 2016**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 200/526/Sj Tanggal 21 Februari 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Provinsi Se Indonesia, maka Gubernur berkewajiban membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pokja IDI NTT) Tahun 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); /

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pokja IDI NTT) Tahun 2016.
- KEDUA** : Pengarah dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas melakukan upaya-upaya preventif dan represif dalam rangka peningkatan Hasil IDI NTT dari kategori sedang pada Tahun 2014 menjadi kategori baik pada Tahun 2016.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 MARET 2016

H. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Pokja masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 67 /KEP/HK/2016

TANGGAL : 17 MARET 2016

PENGARAH DARI KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (POKJA IDI NTT)
TAHUN 2016

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

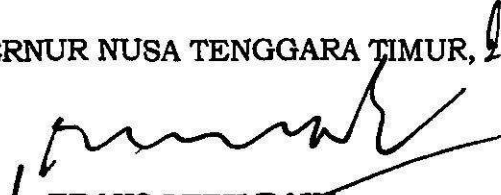
FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 67 /KEP/HK/2016**TANGGAL** : 17 MARET 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (POKJA IDI NTT)
TAHUN 2016

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengarahkan, membina dan mengkoordinasi tugas dan fungsi Pokja Pengembangan Demokrasi Indonesia tingkat Provinsi NTT
2	Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengarahkan, membina dan mengkoordinasi tugas dan fungsi Pokja Pengembangan Demokrasi Indonesia tingkat Provinsi NTT
3	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretaris	Membantu ketua dalam mempersiapkan fasilitas pelaksanaan rapat, penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pokja Pengembangan Demokrasi Indonesia tingkat Provinsi NTT
4	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT	Anggota	a. memberikan sosialisasi dan informasi tentang hasil IDI Provinsi NTT; b. melakukan pengawasan terhadap data yang dihasilkan oleh Instansi yang berwenang melakukan pendataan (BPS Provinsi NTT);
5	Kepala Bidang Politik pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	
6	Ketua Sinode GMIT	Anggota	
7	Uskup Agung Kupang	Anggota	
8	Ketua MUI NTT	Anggota	
9	DR. Lerry Rupidara, M.Si	Anggota	
10	DR. Jhon Tuba Helan	Anggota	
11	DR. Drs. Zeth Sonny Libing, M.Si	Anggota	
12	Pemimpin Redaksi SKH Pos Kupang	Anggota	
13	Pemimpin Redaksi Timor Express	Anggota	
14	Direktur IntelKam Polda NTT	Anggota	
15	Pakum Rem 161 Wirasakti Kupang	Anggota	
16	Kasi Pengembangan Berita RRI Kupang	Anggota	

17	Drs. Yusuf Kuahaty, SU (Akademisi Fisipol Undana Kupang)	Anggota	<p>c. melakukan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan politik Tingkat Provinsi NTT;</p> <p>d. menyiapkan fasilitas rapat persiapan dan pelaksanaan rapat;</p> <p>e. menyelenggarakan pelayanan Administrasi kegiatan Pokja dan Pengembangan Demokrasi Provinsi NTT; dan</p> <p>f. menyelesaikan Laporan Hasil Rapat Triwulan, Laporan Hasil Seminar dan Expose Pokja IDI NTT Tahun Anggaran 2016.</p>
18	DR. Ahmad Atang, M.Si (Akademisi Universitas Muhammadiyah Kupang)	Anggota	
19	DR. Theresia Geme, SH, MH (Akademisi UNIKA Widya Mandira Kupang)	Anggota	
20	Erni Toelle/Setwan DPRD Provinsi NTT	Anggota	
21	Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT	Anggota	
22	Kepala Kantor PDE Provinsi NTT	Anggota	
23	Kepala Bidang Sosial pada Badan Pusat Statistik Provinsi NTT	Anggota	
24	Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
25	Kepala Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	
26	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi pada BAPPEDA Provinsi NTT	Anggota	
27	Kepala Seksi Statistik Ketahanan Sosial pada Badan Pusat Statistik Provinsi NTT	Anggota	
28	Kepala Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	
29	Kepala Sub Bagian Program Data dan Evaluasi (PDE) pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	
30	Ermelinda B Langa, SH	Anggota	
31	Nobel Idel Padaleti, S.Sos	Anggota	
32	Jusuf Nalle	Anggota	
33	Josefina Lewar	Anggota	
34	Fredrik S. Burenni	Anggota	
35	I Wayan Kariada	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA